



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2021

Kamis, 20 Januari 2022

EDISI: 0022G532/GBP/1/2022

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM, No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Email : humas-ip@pertanian.go.id, Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

KAMIS, 20 JANUARI 2022

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. PERKEBUNAN :

- Kedepankan Transparansi Dana Subsidi Minyak Goreng (K)..... 1
- Tekan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Kucurkan Rp7,6T (SI)..... 2-3
- Gapki: Ketersediaan CPO Cukup untuk Poduksi Migor Domestik (ID)..... 4-5
- Indonesia to Tighten CPO Export Rules (TJP)..... 6-7

2. LITBANG PERTANIAN :

- Cegah Tengkes dengan Teknologi Pangan (K)..... 8

3. KETAHANAN PANGAN :

- Harga Minyak Goreng di Daerah masih Bervariasi (MI)..... 9
- Harga Minyak Goreng Belum Kompak Turun (KN)..... 10
- Produsen Ingatkan Ramadan (BI)..... 11
- AIMMI Wanti-Wanti Kecukupan Minyak Goreng (R)..... 12
- Migor Murah Ludes dalam Hitungan Jam (R)..... 13-14
- Impor Jadi Pilihan (BI)..... 15-16

4. PERTANIAN UMUM :

- Serapan KUR Pertanian Capai Rp 85,62 Triliun (ID)..... 17
- Sukses Dukung Ketangguhan UMKM, BRI Dinobatkan sebagai Penyalur KUR Terbaik 2021 (MI)..... 18-19

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

OPINI/ARTIKEL :

- Reformasi Lahan untuk Kesejahteraan (BI)..... 20-21
- Visa Pertanian Australia dan Regenerasi Petani Indonesia (SI)..... 22-23
- Agama dan Boros Pangan (R)..... 24-25
- Syahrul Yasin Limpo (MI)..... 26

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PERDAGANGAN

Kedepankan Transparansi Dana Subsidi Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS untuk menyubsidi minyak goreng diharapkan transparan agar tidak disalahgunakan. Transparansi itu mencakup harga atau nilai keekonomian minyak goreng hingga besaran subsidi yang ditentukan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, kendati dinikmati masyarakat, subsidi minyak goreng kemasan sederhana dan premium sebenarnya diberikan kepada swasta. Dalam konteks ini, subsidi untuk menutup selisih harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000 per liter itu ditujukan bagi produsen minyak goreng.

Tak hanya kemasan sederhana, pemerintah juga menyubsidi minyak goreng kemasan premium. Di sisi biaya produksi saja, keduanya berbeda, tetapi harga keekonomisannya dipatok sama. "Oleh karena itu, pemanfaatan dana BPDPKS harus transparan. Audit atau penghitungan biaya produksi perlu dilakukan dan dibuka. Begitu juga penentuan harga keekonomian dan subsidi," kata Bhima ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (19/1/2022). **K-1**

Per 19 Januari 2022, pemerintah menerapkan kebijakan

minyak goreng satu harga, yaitu Rp 14.000 per liter, untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Jumlah minyak goreng bersubsidi yang akan digelontorkan selama enam bulan mencapai 1,5 miliar liter.

Pemerintah menyediakan dana Rp 7,6 triliun untuk menutup selisih harga keekonomian dan HET. Harga keekonomian minyak goreng akan dievaluasi setiap bulan dengan melihat pergerakan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) global.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, harga keekonomian minyak goreng kemasan sederhana dan premium untuk bulan ini ditetapkan sama, yaitu Rp 17.000 per liter. Jadi, jika HET-nya Rp 14.000 per liter, pemerintah akan menutup selisih Rp 3.000 per liter (*Kompas*, 19/1/2022).

Selain transparansi, perlu diperhatikan pula efektivitas subsidi terhadap pengendalian harga minyak goreng. Selama harga CPO global masih tinggi, harga minyak goreng dalam negeri diperkirakan masih tinggi. Harga CPO global di bursa komoditas Malaysia per 19 Januari 2022 tembus 5.176 ringgit per ton. Harga ini tertinggi dalam 25 tahun terakhir dan kenaikannya mencapai 60,2 persen setahun terakhir.

Dihubungi secara terpisah, Lutfi mengatakan, pemerintah akan transparansi dalam pe-

manfaatan dana BPDPKS. Mekanismenya dimatangkan melalui penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah juga membuka nilai subsidi dan harga keekonomian minyak goreng periode Januari 2022, masing-masing Rp 3.000 per liter dan Rp 17.000 per liter.

Subsidi Rp 3.000 per liter itu murni untuk menutup selisih

harga keekonomian dengan HET. Untuk biaya distribusi, terutama di daerah terpencil, pemerintah akan mengganti ongkos pengiriman dengan mengalokasikan Rp 7,6 triliun.

Dalam Rapat Komisi VI DPR dengan pelaku usaha sektor sawit dan minyak goreng, Rabu siang, Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko Kasman menyatakan, kebijakan satu harga tidak menguntungkan produsen meski ada subsidi pemerintah. "Harga bahan baku utamanya, CPO, saja kami beli di atas Rp 11.000 per liter. Itu belum biaya pengapalan, kemasan, dan produksi," ujarnya.

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, program satu harga bagus untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. "Besaran subsidi Rp 3.000 per liter ini cukup kecil. Pengusaha pasti menanggung atau menyerap kekurangannya. Namun, inilah yang dinamakan berbagi beban, *sharing the pain*," katanya. (HEN/RAM)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Tekan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Kucurkan Rp7,6 T

Mulai Hari Ini Masyarakat Bisa Mendapatkan Minyak Goreng Seharga Rp14.000 per Liter

JAKARTA – Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp7,6 triliun untuk memberikan subsidi terhadap harga minyak goreng. Anggaran tersebut diambilkan dari dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari BPDPKS sebesar Rp7,6 triliun," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin rapat Komite Pengarah BPDPKS di Jakarta kemarin.

Dengan demikian, menurut

Airlangga, pemerintah memastikan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000,00 per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.

"Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat," kata Airlangga. Si 19/1/22

Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni sebesar Rp14.000 per liter, akan dimulai pada hari Rabu (19/1) pukul 00.00 WIB di selu-

ruh Indonesia. "Namun khusus untuk pasar tradisional diberi waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan," kata Menko Airlangga.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah harus memastikan, program subsidi minyak goreng sebanyak 1,2 miliar liter seharga Rp14.000 yang dijalankan saat ini tidak terjadi kecurangan. Mendag Lutfi menegaskan, kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) terhadap ekspor minyak sawit (*crude palm oil* /CPO), *palmolein*, dan minyak jelantah yang akan diterapkan tersebut bukan berarti melarang ekspor sepenuhnya.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

"Untuk memastikan tidak ada kecurangan itu, kita akan melartaskan, bukan melarang. Untuk minyak jelantah, *palm olein*, dan CPO," kata Mendag dalam konferensi pers *Outlook Perdagangan 2022* kemarin.

Adapun kecurangan yang dimaksud adalah mengekspor minyak sawit ke luar negeri yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah. Praktik tersebut harus dicegah agar masyarakat bisa mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau secara mudah.

"Kita harus memastikan tidak ada kecurangan daripada subsidi minyak goreng yang dikerjakan oleh pemerintah," kata Lutfi.

Mendag menambahkan bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh harga CPO global. Kenaikan harga CPO dunia membuat harga minyak goreng di dalam negeri ikut terkerek.

Harga Pangan Diklaim Turun

Selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), harga bahan pangan mengalami kenaikan. "Dari 2018 sampai 2020 *tuh* biasanya kenaikan harga ada dua kali. Pertama saat Lebaran dan kedua saat Nataru. Biasanya naik pas Lebaran kemudian turun, naik lagi pas Nataru. Sebenarnya pada 2021, jika dibandingkan dengan inflasi sebenar-

nya tidak ada kenaikan sama sekali," ujar Mendag Lutfi.

Mendag menjelaskan, kondisi harga bahan pangan pada 2021 di pasaran disebabkan dari sisi permintaan yang belum pulih sepenuhnya dan pasokan pangannya juga cukup sehingga tidak terjadi pertumbuhan yang sangat berarti.

Menurut Mendag, saat ini harga bahan pangan sudah berangsur menurun, bahkan turunnya signifikan. Seperti diketahui bersama, harga cabai rawit merah saat menjelang Nataru sempat tembus Rp100.000-120.000/kg. Sekarang sudah turun di bawah Rp76.000.

**MNC Media/
advenia elisabeth**

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Gapki: Ketersediaan CPO Cukup untuk Produksi Migor Domestik

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan, ketersediaan minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) nasional sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak goreng (migor) domestik, termasuk program migor satu harga setara Rp 14 ribu per liter. Kebutuhan CPO untuk bahan baku industri migor hanya 8-8,5 juta ton per tahun, sementara produksi komoditas perkebunan tersebut terus meningkat yang pada 2020 saja mencapai 47 juta ton.

Oleh Ridho Syukra dan Tri Listiyarini

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, fluktuasi harga migor akan terus terjadi mengikuti perkembangan harga minyak nabati, khususnya minyak sawit, di pasar global. Kenaikan harga migor yang terjadi saat ini bukanlah karena persoalan kesulitan pasokan bahan baku, ketersediaan migor tetap ada hanya saja harganya mahal. Masyarakat di level bawah yang biasanya menikmati migor dengan harga terjangkau (*affordable*) kini menghadapi mahalnya harga produk tersebut. "Harga migor tinggi karena harga CPO sebagai bahan bakunya mahal, bukan karena kesulitan pasokan bahan baku. Ketersediaan CPO nasional sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi migor domestik. Kebutuhan CPO untuk industri migor itu masih jauh di bawah produksi CPO itu sendiri," ungkap Joko Supriyono saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR yang dipantau di Jakarta, Rabu (19/1).

Sebenarnya, kata Joko, kenaikan harga CPO saat ini adalah berkah,



Joko Supriyono

petani sawit yang biasanya menerima harga tandan buah segar (TBS) di bawah Rp 1.000 per kilogram (kg) kini menikmati harga Rp 3.000 per kg. Artinya, kenaikan harga CPO membuat ada remunerasi bagi petani sawit Indonesia. Selama ini, dalam menyikapi kenaikan harga migor akibat melonjaknya harga CPO, pemerintah menyelesaikannya dengan operasi pasar (OP). Untuk tahun ini, kelihatannya OP mengalami kesulitan karena

memang harga CPO sangat tinggi. Dalam menjalankan OP, pelaku usaha selama ini juga menanggung rugi tapi tetap dijalankan, tapi karena saat ini gap harga terlalu tinggi membuat OP migor menjadi tersendat. "Karena itu, kami setuju persoalan tata niaga migor perlu diatur. Dan kami mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanfaatkan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurangi beban (pelaku usaha)," papar Joko.

Skema pemberian subsidi pada kebijakan migor satu harga dengan menggunakan dana sawit yang dikelola BPDPKS baru bisa dilakukan saat ini karena regulasinya sudah ada, sebelumnya upaya itu tidak bisa dilakukan karena regulasi belum mendukung. "Aturannya sekarang bisa, ada UU Perkebunan yang masuk kerangka UU Cipta Kerja, ada juga perpresnya yang memungkinkan dana sawit di-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

“

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi saat ini bukanlah karena persoalan kesulitan pasokan bahan baku.

gunakan untuk subsidi pangan. Apa yang dilakukan pemerintah ini kami mendukung artinya dengan dana pungutan ekspor (PE) yang selama ini sudah ada,” kata Joko. Kebetulan, pada 2021, harga sawit tinggi sehingga PE yang didapat cukup banyak. PE dipungut progresif dengan harga CPO, ketika tahun lalu harga demikian tinggi tentu hasil PE besar dan inilah yang kemudian digunakan untuk menambal subsidi (migor).

Joko menuturkan, mekanisme serupa sudah jauh lebih dulu diterapkan di Malaysia. Indonesia pun sebenarnya sudah lama ingin meniru Malaysia, namun karena regulasi yang tidak mendukung sehingga belum bisa dilakukan. Di Malaysia, saat ini, harga migor di kisaran Rp 8.500 atau RM 2,55 per liter, itu karena Pemerintah Malaysia melalui dana CESS (semacam PE sawit di Indonesia) menyubsidi harga migor. Subsidi diberikan untuk migor kemasan sangat sederhana dengan volume 1 liter, hal ini sudah dilakukan bertahun-tahun lalu dan diberlakukan ketika harga migor menanjak pada harga tertentu yang ditetapkan Pemerintah Malaysia. “Dengan mekanisme serupa diterapkan di Indonesia, kami yakin kebijakan migor satu harga akan jauh lebih *sustain*, karena regulasinya ada, dan ada dana yang setiap tahun dikelola dan memungkinkan untuk menyubsidi migor,” jelas dia.

Terkait kebijakan harga migor satu

harga Rp 14 ribu per liter, kata Joko, sebaiknya didukung lebih dulu oleh semua elemen guna menenangkan pasar. Untuk saat ini, yang terpenting migor dengan harga Rp 14 ribu per liter harus segera tersedia sehingga masyarakat bisa segera memperolehnya.

Pembatasan Ekspor

Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, sedikitnya ada dua catatan penting terkait kenaikan harga migor saat ini. *Pertama*, ketersediaan CPO sebagai bahan baku sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi migor secara nasional. *Kedua*, perlu diatur tata niaga migor, baik kemasan maupun curah. “Terkait ketersediaan bahan baku, kita lihat dulu bagaimana implementasi Permendag No 2 Tahun 2022, tidak menutup kemungkinan terjeleknya nanti bisa ada DMO (*domestic market obligation*/DMO), misalnya 20%, tapi itu hal terakhir yang bisa dilakukan,” kata dia. Yang terpenting saat ini adalah semua pihak memiliki kebersamaan agar masyarakat bisa menjangkau harga migor.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan regulasi baru agar kebutuhan bahan baku migor domestik tetap tersedia sehingga harga migor tetap stabil dengan menerbitkan Permendag No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022. Aturan tersebut mengatur ekspor CPO, lalu *refined, bleached, and deodorized palm olein* (RBD Palm Olein), dan *used cooking oil* (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE). Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☒ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Indonesia to tighten CPO export rules

Policy expected to address rising cooking oil prices

Vincent Fabian Thomas

The Jakarta Post/Jakarta

Indonesia, the world's largest exporter of palm oil, is set to temporarily restrict crude palm oil (CPO) exports starting late January as the country seeks to combat rising cooking oil prices by forcing producers to prioritize domestic markets.

The Trade Ministry said on Tuesday that CPO exporters needed to show proof of selling CPO domestically each time they applied for export permits with the ministry over the next six months, starting Jan. 24. The ministry will withhold export approval documents until receiving such proof.

All exporters are subject to this policy, including those that have never supplied domestic markets before and are not affiliated with cooking oil producers.

"This is not an export ban. We want to ensure CPO availability domestically," Trade Minister Muhammad Lutfi told reporters during a virtual press conference on Tuesday.

The announcement came after the country saw a hike in cooking oil prices for several consecutive months following a surge in international CPO prices amid rising

demand and limited production. Trade Ministry data shows that domestic cooking oil prices rose 46.92 percent year-on-year (yoy) to Rp 19,100 (US\$1.33) per liter on Wednesday.

The policy adds to a list of Indonesia's protectionist policies, such as its market-rattling nickel export ban and coal export ban. Indonesia imposed the latter in January as coal miners were flouting domestic market obligation (DMO) rules, which require all miners to sell at least 25 percent of their output locally at no more than \$70 per ton.

Trade Ministry Foreign Trade Director General Indrasari Wisnu Wardhana, also on Tuesday, said the CPO policy did not set volume and price limits, differentiating it from the coal DMO.

"In the DMO, the amount is set. In this case, it is a self-declaration; how much for exports and how much for domestic [distribution]," he said.

The Indonesian Oil Palm Association (GAPKI) and the Indonesian Vegetable Oil Refiners Association (GIMNI) told House of Representative lawmakers on Wednesday that they supported the government policy to stabilize cooking oil prices.

"We can say that the CPO sup-

ply for cooking oil production is sufficient," said GAPKI chairman Joko Supriyono.

GAPKI deputy chairman Togar Sitanggang said the government was rumored to be considering a minimum 20 percent domestic market allocation for CPO, which would be similar to the coal DMO. He did not specify how the policy would impact CPO producers.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	20/11/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	1 / 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☒ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika			☐ Pojok/Karikatur

Meanwhile, GIMNI executive director Sahat M. Sinaga said the CPO policy would help "balance the palm oil supply in the domestic market".

More subsidized cooking oil

The government has also decided to expand a subsidized cooking oil program that provides the commodity at no more than Rp 14,000 per liter for households and small businesses.

The one-price policy is effective for six months, with a possible extension, starting on Wednesday. Retailers are obliged to sell cooking oil at the designated price once the policy comes into effect, while traditional markets will have one week to adjust.

Lutfi said on Tuesday that the program's budget had been doubled to Rp 7.6 trillion from the previous Rp 3.6 trillion, and the supply increased to 250 million liters a month from 200 million liters. The funds for the budget will come from CPO export levies collected by the Indonesia Oil Palm Plantations Fund Management Agency (BPDPKS).

The government will use the subsidy funds to compensate businesses for the difference between the one-price policy and the "economical prices" for companies.

The program was also expanded to include premium-packaging cooking oil, which is generally higher quality and more expensive than

simple-packaging cooking oil.

Trade Ministry Domestic Trade Director General Oke Nurwan said producers and retailers that flouted the one-price rule would either be denied subsidies or have their business permits either temporarily or permanently revoked.

"The public can report [producers and retailers] if they find violations of this policy," Oke said.

Association of Indonesian Edible Oil Industries (AIMMI) chairman Adi Wisoko said on Wednesday that he worried about the amount of paperwork required to bill subsidies from the government.

"Billing the BDPPKS would require proper documentation. If we sell to supermarkets, they have a taxpayer number, it is clear. But what about *warung* [kiosks]? That is still not clear," Adi said.

GAPKI's Joko supported the decision to use the BPDPKS' fund, saying that the CPO price surge in 2021 resulted in high levies but producers were still expecting to bear significant losses from the one-price policy.

The Indonesian Retailers Association (Aprindo) said on Wednesday that retailers had begun selling all available stock at the mandated price point but capped purchases at 2 liters per customer.

"This is to ensure equal distribution for all consumers so that they can get cooking oil," Aprindo chairman Roy Mandey said in a statement.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☒ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☒ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

RISET DAN INOVASI

Cegah Tengkes dengan Teknologi Pangan

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai produk hasil penelitian teknologi pangan yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional bisa memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah *stunting* atau tengkes pada anak balita. Berbagai produk itu juga bermanfaat untuk mencegah anemia pada remaja putri dan ibu hamil.

Perekayasa Ahli Utama Pusat Teknologi Agroindustri Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi (OR-PPT) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Noer Laili mengutarakan, riset teknologi produksi pangan dilatarbelakangi masalah di Indonesia, yakni kelebihan dan kekurangan gizi. Soal gizi ini membuat anak balita kurus dan gemuk serta menyebabkan anemia pada remaja yang kurang gizi mikro.

"Kondisi mengkhawatirkan yaitu anemia pada ibu hamil 48,9 persen. Pemerintah memberi perhatian pada kesehatan ibu dan anak serta berkomitmen menurunkan angka *stunting*," ujarnya dalam webinar "Riset Teknologi Pangan untuk Mencegah Stunting", Rabu (19/1/2022), di Jakarta.

Salah satu penyebab tengkes ialah rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan mutu. Ibu hamil dengan anemia berdampak pada janin dan saat bayi lahir meningkatkan risiko tengkes hingga memengaruhi kecerdasan.

Hidrolisat kedelai

Terkait hal itu, Pusat Riset Teknologi Agroindustri mengembangkan hidrolisat kedelai mengandung biopeptida dengan berat molekul kurang dari 20 kilo dalton (kd) lewat teknologi termal. Biopeptida meningkatkan absorpsi zat besi dan penggunaan dalam formulasi mendorong efektivitas perbaikan gizi demi mencegah malnutrisi, anemia, dan tengkes.

Dari pengujian secara *in vitro* (di luar tubuh) dan *in vivo*

(pada makhluk hidup), hidrolisat kedelai mampu meningkatkan zat besi lebih tinggi. Hidrolisat kedelai diformulasikan dalam produk pangan siap konsumsi untuk membantu penyerapan zat gizi remaja putri, ibu hamil, dan anak balita.

Produk pangan hasil formulasi hidrolisat kedelai yakni peptida unggul rumput laut (*purula*) untuk mencegah anemia pada remaja putri. Untuk mencegah tengkes, peneliti mengembangkan produk *purula plus*, *crackers*, biskuit, dan *rice flake*. *Purula plus* dan *crackers* bisa dikonsumsi ibu hamil, dan aneka biskuit dikonsumsi anak usia di bawah dua tahun.

Purula merupakan makanan berbentuk *flakes* tabur atau lembaran tipis yang enak dan meningkatkan asupan zat besi karena difortifikasi (ditambah mikronutrien). *Purula* juga mengandung asam amino, seperti *glutamate*, leusina, *arginin*, *aspartate*, dan *histidin*. *Purula* dibuat dari tepung hidrolisat kedelai, bubur rumput laut, dan formula tepung-tepungan.

Sementara biskuit bergizi balita (*betavit*) dibuat dengan tekstur keras, tetapi lumer saat dikonsumsi. Produk ini ditambah tepung kelor untuk meningkatkan kadar gizi. *Betavit* masih tahap pengujian efikasi untuk mendorong status gizi anak usia di bawah dua tahun yang terindikasi tengkes.

Selain produk berbasis hidrolisat kedelai, perekayasa BRIN juga memodifikasi formula makanan melalui optimalisasi penggunaan pangan lokal. Perekayasa Ahli Madya Pusat Teknologi Agroindustri BRIN Retno Windya Kusumaningtyas mengatakan, modifikasi makanan lokal ini dengan mengganti sumber nutrisi murah dan bahan bakunya mudah diperoleh.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Teknologi Agroindustri BRIN Arief Arianto berharap, berbagai produk inovasi yang dikembangkan para periset dan perekayasa di BRIN membantu pemerintah mengatasi masalah tengkes. (MTK) K-8

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/11/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 16 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Minyak Goreng di Daerah masih Bervariasi

Sejumlah daerah masih menjual minyak goreng dengan harga tinggi meski pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga.

RUTA SURYANA

ruta@mediaindonesia.com

PENETAPAN satu harga minyak goreng disambut antusias masyarakat. Sudah sebulan lebih harga minyak goreng tidak kunjung turun. Pemerintah kemarin memutuskan satu harga minyak goreng Rp14 ribu per liter.

Harga minyak goreng kemasan masih bertahan di angka Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per liter di Kabupaten Badung, Bali.

"Harga belum turun, masih Rp21 ribu sampai Rp22 ribu per liter," kata Dana, pedagang minyak goreng di Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemarin.

"Wah, saya kira benar mulai hari ini harga sudah mulai turun ke Rp14 ribu, eh ternyata masih sama," ujar Ayu, salah satu pembeli minyak goreng.

Sama halnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, harga minyak goreng kemasan dan curah masih mahal. Harga minyak

goreng kemasan saat ini masih dijual Rp40 ribu per kg, dari harga sebelumnya Rp30 ribu per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah dari harga Rp30 per kilogram, kini naik menjadi Rp35 ribu per kilogram. "Sudah ada dua pekan harga ini naik," ungkap Lilis Dahlia, pedagang minyak goreng di Palu.

Provinsi Bengkulu tidak menerima kuota bantuan dari produsen minyak goreng karena tidak memiliki perusahaan minyak goreng. Minyak goreng tetap dijual Rp20 ribu per liter.

"Harga Rp14 ribu per liter hanya untuk wilayah yang memiliki perusahaan minyak goreng," kata Kepala Disperindag Provinsi Bengkulu, Yennita Syaiful.

Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, belum seluruh toko menyesuaikan kebijakan harga jual minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter.

Pelaksana tugas Dinas Per-

industrian dan Perdagangan Banyumas Purwadi Santoso mengakui belum seluruh toko modern mematok harga minyak goreng Rp14 ribu per liter. "Tetapi sebagian sudah melaksanakan dengan harga Rp14 ribu per liter sebab dinas sudah mengirimkan surat sementara ke ritel modern," jelas Purwadi.

Antusias satu harga

Pada bagian lain, penetapan satu harga minyak goreng disambut antusias. Di Sumatra Selatan, pemprov setempat memastikan seluruh ritel telah memberlakukan satu harga minyak goreng, yakni Rp14 ribu per liter baik kemasan premium maupun sederhana.

Warga Kota Bandung bisa membeli minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter mulai kemarin. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Elly Wastiah mengatakan untuk saat ini ritel yang sudah siap menjual harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter ialah Superindo, Hypermart, Alfamart, dan Indomaret atau ritel modern di bawah Aprindo.

Dari Cirebon, harga minyak goreng dijual di minimarket

seperti Superindo sudah turun menjadi Rp14 ribu per liter. Asisten Manajer Superindo Siliwangi Hardi menjelaskan harga minyak goreng kemasan sudah turun menjadi Rp14 ribu. "Tapi pembelian dibatasi maksimal dua liter," ujarnya.

Operasi pasar minyak goreng tetap dilanjutkan meski ada penetapan satu harga. Di Kota Padang terus dilakukan operasi pasar minyak goreng.

Kendati pemerintah sudah menetapkan satu harga minyak goreng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan jajaran terkait memonitoring pasar untuk mengamankan kebijakan pemerintah tersebut. (MY/LD/UL/YH/AS/DW/AN/TB/N-1)

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Lintang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Minyak Goreng Belum Kompak Turun

Harga minyak goreng baru turun di toko ritel modern dan belum di pasar tradisional

Achmad Jatnika,
Ratih Waseso Aji

JAKARTA. Harga minyak goreng sudah turun. Setidaknya ini terjadi di gerai ritel modern. Minyak goreng kemasan dijual Rp 14.000 per liter mulai Rabu (19/1) kemarin dan akan berlangsung hingga enam bulan ke depan.

Dalam pengamatan KONTAN di lapangan, penjualan minyak goreng di toko ritel modern, seperti Alfamart, Indomaret, Superindo, dan Hypermart, sudah menjual minyak goreng kemasan sederhana dan premium seharga Rp 14.000 per liter. Harga ini berlaku untuk semua merek minyak goreng sawit.

Tidak hanya kemasan sederhana dengan ukuran satu sampai dua liter. Untuk minyak goreng kemasan jeriken dengan ukuran lima liter, harga jualnya juga sudah tampak menurun menjadi Rp 70.000

untuk berbagai merek. Akan tetapi, di salah satu toko ritel modern dibatasi pembelian hanya per dua kemasan ukuran dua liter.

Namun, perubahan harga ini tidak dibarengi perubahan di pasar tradisional. Dalam

pamatan KONTAN di pasar tradisional Tebet dan Mampang Prapatan, harga minyak goreng kemasan sederhana masih tinggi, yakni anteng di harga Rp 20.000 per liter.

Beberapa pedagang menyebutkan bahwa belum ada sosialisasi kepada pedagang pasar untuk menjual seharga Rp 14.000 per liter. Oleh karena itu, para pedagang masih menjual dengan harga Rp 20.000 per liter.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikapi) Abdullah Mansuri berharap distribusi minyak goreng subsidi dapat ditujukan langsung ke pasar tradisional melalui asosiasi pedagang ataupun agen-agen minyak goreng. Namun rantai distribusi minyak goreng subsidi diharapkan tidak terlalu panjang. Hal tersebut akan berdampak kembali pada harga yang tinggi di tangan konsumen akhir.

"Kami ingin agar distribusi lewat pasar langsung, bukan lewat ritel modern. Ke pasar bisa lewat asosiasi seperti IKAPPI atau agen di pasar. Kendala pada saat kementerian dorong distribusi ke ritel modern kami enggak mungkin minta ke ritel modern, hal ini sangat kami sesalkan," ujar

Pedagang pasar minta minyak goreng subsidi disalurkan ke pasar.

Abdullah.

Perlu tata niaga

Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan perlunya tata niaga baru untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng. Pendapat tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Gabungan Pengusaha Kelapa

Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPNB).

"Catatannya adalah ketersediaan minyak sawit atau CPO sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak goreng secara nasional, namun perlunya diatur terkait tata niaga minyak goreng baik kemasan maupun curah," kata dia dalam RDPU Komisi VI DPR, Rabu (19/1).

Faktor Pendorong Kenaikan Harga Minyak Goreng

1. Kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar global
2. Penurunan produksi akibat penurunan permintaan saat pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB dan PPKM, sehingga ketika permintaan kembali pulih, pasokan minyak goreng terbatas.
3. Banyak stok minyak sawit nasional yang diekspor karena tingginya harga komoditas dan lebih menguntungkan.
4. Pemerintah tak mampu bertindak cepat karena tak memiliki stok minyak goreng dari perusahaan BUMN untuk operasi pasar.

Sumber: Pemberitaan dan Riset KONTAN

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 20/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 14 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

| MINYAK GORENG SATU HARGA | Produsen Ingatkan Ramadan

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah diminta memastikan kecukupan subsidi untuk minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter menjelang Ramadan, seiring dengan potensi kenaikan permintaan domestik dan ekspor. **81.14**

Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko mengemukakan harga minyak sawit juga masih berpeluang naik.

"Keperluan minyak goreng akan luar biasa dan dari sekarang mesti kita pikirkan karena bila terlambat, saya tidak tahu akan seperti apa kenaikan harga," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR, Rabu (19/1).

Pemerintah telah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter untuk berbagai jenis kemasan di seluruh Indonesia. Harga yang lebih rendah dari harga

normal itu diterapkan karena pemerintah memberikan subsidi atas harga keekonomian. Kementerian Perdagangan menyebutkan harga keekonomian minyak goreng, baik premium maupun kemasan sederhana, dipatok Rp17.000 per liter sehingga subsidi yang disiapkan Rp3.000 per liter.

Adapun, alokasi anggaran subsidi yang diberikan pemerintah berjumlah Rp7,6 triliun untuk pengadaan 1,5 miliar liter minyak goreng selama 6 bulan mendatang.

"Meskipun harga sudah ditetapkan Rp14.000 per liter, apakah itu bisa menjangkau konsumsi yang tinggi pada bulan-bulan itu [Ramadan]? Ditambah lagi ada ekstra pembelian dari internasional," kata Adi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai sebagian besar produksi produk minyak sa-

wit dipasok untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Pada 2019, persentase konsumsi domestik sekitar 31% dari total produksi dan pada 2021 meningkat menjadi 35% akibat implementasi kebijakan biodiesel. Serapan dalam negeri diperkirakan naik menjadi 37%. "Kita adalah produsen terbesar di dunia, tetapi tidak bisa menjadi *price leader* [penentu harga] karena mayoritas produksi kita tidak dikonsumsi oleh domestik."

Bila tingkat konsumsi hingga tahun ini masih berkisar 37%, dia menilai sulit bagi Indonesia menjadi penentu harga.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menegaskan asosiasinya telah menjual minyak goreng seharga Rp14.000 per satu liter mulai kemarin. Langkah itu merupakan dukungan Aprindo kepada pemerintah.

(ilm.fathimah Timorria/Nyoman Ary Wahyudi)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

AIMMI Wanti-Wanti Kecukupan Minyak Goreng

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) meminta pemerintah agar mempersiapkan kecukupan subsidi minyak goreng. Menurut dia, volume permintaan domestik dan ekspor akan melonjak, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Keperluan minyak goreng akan luar biasa dan ini perlu dari sekarang kita pikirkan karena bila terlambat saya tidak tahu akan seperti apa kenaikan harganya," kata Ketua AIMMI Adi Wisoko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR, Rabu (19/1).

Pemerintah telah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp 14 ribu per liter untuk seluruh jenis kemasan di seluruh wilayah Indonesia. Harga keekonomian minyak goreng berada di kisaran Rp 17 ribu sehingga pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 3.000 per liter. Total anggaran subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 7,6 triliun untuk 1,5 miliar liter minyak goreng selama enam bulan ke depan.

"Meski harga sudah ditetapkan Rp 14 ribu per liter, apakah itu bisa menjangkau konsumsi yang tinggi pada bulan-bulan itu? Ditambah lagi ada ekstra pembelian dari internasional," kata Adi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan, tingkat konsumsi produk sawit oleh konsumen dalam negeri terus meningkat, tapi belum

mendominasi. Pada 2019 lalu, persentase konsumsi domestik sekitar 31 persen dari total produksi. Pada 2021, konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan menjadi 35 persen karena adanya program bahan bakar biodiesel B-30.

Memasuki 2022, konsumsi masyarakat dalam negeri diperkirakan naik menjadi 37 persen. "Kami melihat, kita adalah produsen terbesar di dunia. Tapi, kita baru bisa menjadi *price leader* (penentu harga) apabila 60 persen produksi kita dikonsumsi oleh domestik," kata Sahat. R-16

Sahat mengatakan, jika tingkat konsumsi hingga tahun ini masih berkisar 37 persen, akan sulit bagi Indonesia untuk menjadi penentu harga. Sebab, mayoritas produksi dikonsumsi oleh pasar internasional. Itu sebabnya harga saat ini masih tergantung pada situasi global.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memberlakukan kewajiban pencatatan ekspor produk minyak sawit. Aturan itu dibuat untuk memastikan keamanan pasokan di dalam negeri, terutama minyak goreng yang tengah disubsidi oleh pemerintah.

"Dalam pencatatan melalui persetujuan ekspor, pelaku usaha melakukan *self declaration* terhadap jumlah yang diekspor dan yang dipasok ke dalam negeri. Ini yang akan kami catat dan kami lihat," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra-sari Wisnu Wardhana.

■ ed: ahmad fikri noor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Migor Murah Ludes dalam Hitungan Jam

■ EVA RIANTI, WILDA FIZRIYANI

JAKARTA — Program minyak goreng (migor) satu harga diserbu warga. Minyak goreng yang dibanderol Rp 14 ribu per liter untuk semua jenis kemasan itu ludes dalam hitungan jam pada sejumlah toko ritel modern di beberapa daerah.

Pemerintah menerapkan kebijakan satu harga sebagai solusi atas tingginya harga minyak goreng. Dalam program ini, minyak goreng kemasan sederhana ataupun premium dijual dengan harga Rp 14 ribu per liter. Pada tahap awal, program ini terlebih dahulu berlaku di toko ritel modern.

Warga Tangerang Selatan, Tina (38 tahun), sangat antusias ketika mengetahui adanya minyak goreng murah di *minimarket*. Dia mengetahui informasi tersebut dari media dan langsung berinisiatif membeli minyak goreng pada pagi hari karena takut kehabisan.

"Pasti diserbu, *wong* harganya murah. Di toko-toko lain kan belakangan ini harga minyak goreng melambung sampai Rp 40 ribu per 2 liter. Ini hanya Rp 28 ribu. Siapa yang *enggak* mau? Apalagi ibu-ibu," kata Tina, kemarin.

Menurut dia, harga minyak goreng murah di toko ritel modern menjadi angin segar di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng. Dia mengaku sempat mengurangi konsumsi minyak goreng karena harganya yang dinilai mencekik.

Ia mengatakan, setiap pembeli hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng. "Tapi, saya senang dapat harga murah. Mudah-mudahan harga murah ini bisa seterusnya," ujar dia.

Berdasarkan pantauan *Republika*, minyak go-

reng Rp 14 ribu per liter telah diberlakukan di berbagai toko ritel modern di Tangsel, seperti Indomaret. Ini seperti yang terlihat di Jalan Artowijoyo dan Jalan Wana Kencana, Serpong, Tangsel. Harga minyak goreng tertera Rp 28 ribu per dua liter.

Agi (19), seorang karyawan Indomaret di Jalan Wana Kencana, Serpong, menceritakan, masyarakat sejak pagi sudah berbondong-bondong ke gerai untuk membeli minyak goreng murah tersebut. Bahkan, kata dia, stok minyak goreng yang ada ludes dalam hitungan kurang dari dua jam.

"Dari jam 08.00 WIB masyarakat sudah antri panjang banget. Stok kami ada 30 karton minyak goreng, itu sudah ludes pukul 09.30 WIB. Mereka dibatasi hanya boleh membeli 2 liter," tutur Agi saat ditemui *Republika* di tempatnya bekerja, Rabu (19/1).

Di gerai Indomaret lainnya di Jalan Artowijoyo, Serpong, stok minyak goreng terlihat sudah tidak lagi tersedia di rak. Masyarakat sudah memburunya sejak pagi.

"Kemungkinan besok juga bakal diserbu sama warga, selama harga minyak goreng murah begini," ujar seorang karyawan bernama Ani.

Kondisi serupa terjadi di Jombang, Jawa Timur. Stok minyak goreng di toko ritel modern habis terjual dalam beberapa jam. Warga Jombang, Desy Ari Susanti, mengetahui informasi harga minyak goreng dari grup Whatsapp khusus kalangan ibu-ibu. Mendengar informasi tersebut, Desy pun langsung mendatangi retail modern terdekat pada Rabu (19/1) pagi.

Desy mendatangi retail modern Indomaret sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu, dia belum melihat antrian panjang akibat pembelian minyak goreng. Tingkat keramaiannya masih terlihat normal seperti biasanya.

Hal yang pasti, kata Desy, stok mi-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Warga tak perlu *panic buying*.

nyak goreng pada Rabu (19/1) pukul 08.30 WIB masih banyak. Dia masih bisa membeli tiga minyak goreng untuk stok di rumah. Namun, bersebelang beberapa jam, Desy mendapatkan kabar bahwa komoditas ini sudah habis terjual. "Tenjanku jam setengah 11 siang bilang sudah pada kosong raknya," katanya.

Desy merasa sangat senang dengan adanya kebijakan penyesuaian harga minyak goreng. Kebijakan ini sangat membantu, apalagi ibunya bisa menghabiskan dua liter minyak goreng setiap pekan. Sebab, kenaikan harga minyak goreng beberapa lalu cukup membuat keluarganya terbebani.

Desy berharap harga bahan pokok, termasuk minyak, goreng tetap stabil. Hal ini penting mengingat dalam waktu dekat juga akan memasuki Ramadhan. "Jangan pada naik lagi, *nggak* cuma minyak, tapi semua bahan pokok," ujar perempuan berhijab ini menjelaskan.

Di Ibu Kota, warga juga memburu minyak goreng murah. Gerai Alfamart dan Indomaret di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, misalnya, ramai didatangi pembeli sejak pagi hari.

Stok migor di berbagai toko ritel modern terpantau masih tersedia pada siang hari. Namun, di beberapa lokasi stok mulai menipis. Di setiap gerai, dicantumkan keterangan bahwa pembelian dibatasi maksimal dua

liter. Meski demikian, banyak kerabat dari pembeli yang membantu mengakali jatah pembelian setiap orang.

Di Bogor, Jawa Barat, belum semua gerai ritel modern menjual minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter. Masih ada yang menjual dengan harga di atas Rp 14 ribu per liter. Hal itu seperti yang terlihat di salah satu gerai di Jalan Achmad Adnawijaya, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Minyak goreng di minimarket tersebut masih dibanderol seharga Rp 37 ribu hingga Rp 42 ribu per 2 liter.

Salah satu karyawan di minimarket tersebut, Muhammad, mengaku belum mengetahui informasi adanya penurunan harga minyak goreng. Dalam harga yang tertera di etalase, harga yang diterapkan berlaku hingga 31 Januari 2022.

"Di sini belum ada pemberitahuan. Hanya dibatasi per orang maksimal pembelian dua bungkus," ujar Muhammad.

Ritel modern Alfamart menyatakan mendukung program minyak goreng satu harga. Minyak goreng tersebut sudah tersedia mulai Rabu (19/1).

Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Nur Rachman, mengatakan, harga minyak goreng yang dijual Rp 14 ribu per liter merupakan subsidi pemerintah. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta pelaku UMKM.

"Jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi di seluruh Indonesia mendukung program pemerintah ini," ujarnya dalam siaran pers.

Karena tujuannya untuk pengguna akhir, konsumen diharapkan membeli dalam jumlah wajar. Masyarakat diingatkan untuk tidak *panic buying* karena pemerintah menjamin stoknya. "Ini supaya tujuan satu harga bisa tercapai, yakni distribusi kepada konsumen akhir secara merata," katanya.

■ zainur mahsir ramadhan/sholihina zakaria/
dedy darmawan nasution ea: satria kartika yudha

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

| PENGAMANAN STOK & HARGA PANGAN |

IMPOR JADI PILIHAN

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor untuk tiga komoditas pangan yakni gula, daging sapi, dan bawang putih pada tahun ini guna menjamin stok memadai sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran.

Ilim Fathimah Timorria & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan izin impor 2022 telah dikeluarkan kendati kuotanya tidak disebutkan secara terperinci.

"Stok akan menjadi lebih dari cukup untuk memastikan bahwa kalau terjadi kenaikan harga kita mempunyai ketersediaan yang cukup untuk kepentingan nasional," katanya, Selasa (18/1). **B1-3**

Mendag memprediksi beberapa komoditas yang izin impornya sudah keluar akan tiba di pelabuhan Indonesia dalam beberapa pekan mendatang atau akhir bulan ini.

Selain gula, Lutfi belum bisa mengungkapkan volume impor daging sapi yang disetujui pemerintah, karena pasokan dan permintaan global dalam kondisi ketat, sehingga harga menjadi sensitif.

Laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebutkan bahwa kebutuhan gula mentah untuk gula kristal putih (GKP) pada 2022 mencapai 900.000 ton. Adapun dari perhitungan awal Kementerian Pertanian, kebutuhan impor daging sapi maupun kerbau pada 2022 sebesar 226.065 ton.

Untuk bawang putih, Lutfi memperkirakan impor berkisar 500.000 ton. Berkaca pada realisasi tahun lalu, pemasukan bawang putih mencapai 475.000 ton dari persetujuan impor sebanyak 600.000 ton yang dikeluarkan Kemendag. Adapun rekomendasi teknis dari Kementan untuk impor bawang putih mencapai 864.000 ton pada 2021.

Mendag mengemukakan harga pangan sepanjang 2021 cenderung terkendali. Inflasi *volatile food* pada tahun lalu sebesar 3,20% dan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Pada 2018, inflasi *volatile food* mencapai 3,39%, pada 2019 sebesar 4,30%, dan 2020 sebesar 3,62 % secara tahunan.

"Kalau dilihat dan dibandingkan dengan inflasi itu sebenarnya tidak ada kenaikan sama sekali."

Inflasi *volatile food* selama 2021 dipengaruhi oleh kenaikan harga telur, daging ayam ras, minyak goreng, dan daging sapi pada momen Ramadan dan Idulfitri. Pada momen Natal dan Tahun Baru 2022, inflasi didorong oleh telur, daging ayam ras, minyak goreng, dan cabai rawit.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan inflasi *volatile food*

pada 2022 lebih tinggi daripada 2021, seiring dengan kenaikan konsumsi masyarakat di tengah membaiknya perekonomian.

Kenaikan konsumsi yang belum diimbangi dengan perbaikan rantai pasok bisa berpengaruh ke harga pangan meski pasokan memadai. "Kemungkinan bisa mencapai 3,5%."

Menurut dia, beras cukup sensitif pergerakan harganya, terutama di daerah yang defisit antara tingkat produksi dan konsumsinya. Selain itu harga minyak goreng ke depan juga perlu diwaspadai meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan subsidi untuk penerapan satu harga Rp14.000 per liter.

"Sejauh mana anggaran tersedia, ini menjadi pertanyaan karena harga diprediksi masih tinggi sepanjang 2022," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia Abdul Hamid memperkirakan pasokan cukup besar pada semester I/2022 yang bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri. Panen di sejumlah daerah telah menurunkan harga cabai. "Kami justru mengkhawatirkan harga jatuh, sehingga perlu mitigasi. Ini yang sejak dulu belum terurai."

Harga rata-rata cabai rawit, yang sempat menyentuh Rp90.000 per kg pada akhir Desember 2021, meng-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

JANGAN BIARKAN MEROKET

Tahun 2022 tidak bisa dipandang sebagai periode yang 'aman-aman' saja untuk pangan. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah potensi kuat terjadinya inflasi *volatile food*, yang sepanjang 2021 terpantau terkendali. Bahkan merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Sinyal awal risiko tersebut bisa dibaca dari inflasi *volatile food* pada Desember 2021 yang mencapai level tertinggi.

Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok Nasional (Rp)

Komoditas	Sat	17 Jan 2022	18 Jan 2022	(%)	Ket
Beras Premium	kg	12.400	12.400	0.00	☐
Beras Medium	kg	10.400	10.400	0.00	☐
Gula Pasir	kg	13.800	13.900	0.72	▲
Minyak Goreng Curah	Lt	18.100	18.100	0.00	☐
Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Lt	18.900	19.100	1.06	▲
Kedelai Impor	kg	12.500	12.500	0.00	☐
Tepung Terigu	kg	10.600	10.600	0.00	☐
Daging Sapi Paha Belakang	kg	126.500	126.500	0.00	☐
Daging Ayam Ras	kg	38.000	38.100	0.26	▲
Telur Ayam Ras	kg	28.500	28.300	-0.70	▼
Cabe Merah Besar	kg	37.300	37.000	-0.80	▼
Cabe Merah Keriting	kg	37.500	37.600	0.27	▲
Cabe Rawit Merah	kg	60.200	59.500	-1.16	▼
Bawang Merah	kg	30.300	30.200	-0.33	▼
Bawang Putih Honan	kg	28.800	28.900	0.35	▲

Sumber: Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, diolah

BISNIS/SINTA NOVIZAH

alami penurunan 31,53% menjadi Rp59.500 per kg per 18 Januari 2022. Harga masih berpeluang turun seiring puncak panen pada Februari.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Sugeng Wahyudi mengatakan kenaikan harga

daging ayam ras pada 2022 lebih banyak dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi, alih-alih kenaikan konsumsi. Namun pasokan daging ayam masih tetap surplus. "Kenaikan harga lebih banyak dipicu oleh naiknya biaya produksi," ujarnya.

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Serapan KUR Pertanian Capai Rp 85,62 Triliun

JAKARTA – Realisasi serapan kredit usaha rakyat (KUR) di sektor pertanian pada 2021 mencapai Rp 85,62 triliun, atau 122,31% dari target Rp 70 triliun, dengan 2,6 juta debitur. Tingginya realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tersebut didorong oleh inovasi dan kebijakan KUR yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) di antaranya meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan.

Upaya lain Kementan untuk memacu serapan KUR adalah melalui pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (klaster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (*offtaker*). Selain itu, relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit KUR. "Kementan akan terus memacu sektor pertanian agar kesejahteraan petani tercapai, dengan membantu permodalan usaha tani dan mampu bertahan ditengah badai pandemi Covid-19," ungkap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Dalam keterangan Kementan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan atas capaian penyaluran KUR pertanian kepada Mentan Syahrul yang dinilai sukses menyalurkan KUR dengan jumlah yang sangat besar dan tertinggi. "Capaian penyaluran KUR Kementan selama 2021 sangatlah besar, KUR 2021 telah dinikmati 7,5 juta debitur dan permintaannya terus meningkat," ujar Menko Airlangga yang sekaligus Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (18/1).

Menko Airlangga mengapresiasi penyaluran KUR pertanian yang digulirkan Kementan selama beberapa tahun terakhir. Fasilitas KUR

mampu memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, selama ini layanan KUR mampu membuat banyak petani kembali menghidupkan usaha taninya. "KUR juga berdampak besar terhadap pengembangan usaha peternakan terintegrasi, pengembangan industri rumput laut, padat karya pertanian dan perikanan, kartu tani pupuk bersubsidi, pengendalian alih fungsi lahan dan pengembangan korporasi petani," tutur Airlangga.

Mentan berterimakasih atas perhatian Kemenko Perekonomian atas jalanya program KUR pertanian yang bergulir selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam mendukung upaya peningkatan pangan nasional. "Kami menyadari keterbatasan anggaran pemerintah tidak akan mampu sepenuhnya membiayai sektor pertanian. Dengan capaian KUR yang sangat baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada Himbara, petani, dan semua pihak yang mendukung jalannya pertanian maju, mandiri, dan modern," papar Mentan.

Pada 2022, pemerintah telah menaikkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun. Untuk itu, Menko Airlangga berharap bahwa UMKM dapat termotivasi dan KUR bisa disalurkan dengan baik. Pelaksanaan KUR pada 2022 diharapkan menjadi lebih baik lagi dari 2021.

Pada bagian lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia membukukan transaksi ekspor pertanian hingga US\$ 4,24 miliar pada 2021 atau meningkat 2,86% dari tahun sebelumnya US\$ 4,12 miliar. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menyebutkan, catatan kinerja ekspor pertanian selama 2021 melanjutkan tren positif yang telah ditorehkan sektor pertanian, terutama sejak masa pandemi. (dho) 10.11

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☒ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	20/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	1/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☐ Investor Daily	☒ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika			☐ Pojok/Karikatur

Sukses Dukung Ketangguhan UMKM, BRI Dinobatkan sebagai Penyalur KUR Terbaik 2021

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan prestasi atas keberhasilannya dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.

Capaian ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) di mana BRI mendapat penghargaan sebagai Peringkat 1 Penyalur KUR Terbaik 2021 Kategori Bank Umum.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Direktur Bisnis Mikro BRI Supari di Jakarta, 18 Januari 2022. Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta *stakeholder* bank penyalur dan penjamin KUR.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyampaikan selamat kepada BRI atas prestasi tersebut. "Diharapkan melalui penghargaan ini, dapat meningkatkan kinerja dan capaian program KUR sehingga UMKM dapat

lebih maju dan berdaya saing tinggi," ujarnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah melihat KUR menjadi salah satu pendorong tertinggi pemulihan ekonomi. Di masa pandemi Covid-19, lanjutnya, pemulihan UMKM menjadi salah satu program utama pemerintah dan diwujudkan melalui dukungan kebijakan terhadap UMKM dan korporasi.

Pencapaian yang positif pada program KUR ini diakui oleh Airlangga tidak terlepas dari kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, termasuk penyalur dan penjamin KUR. Ke depan, lembaga penyalur KUR diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memperluas akses pembiayaan kepada UMKM di Indonesia.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari pun mengatakan, penghargaan ini akan menjadi salah satu motivasi bagi BRI untuk terus meningkatkan penyaluran KUR ke depan.

Ia optimistis, kapasitas dan kemampuan BRI dapat mengantarkan keberhasilan untuk mencapai target penyaluran KUR 2022.

"Berbagai strategi telah

dirancang untuk memenuhi target penyaluran KUR 2022. Selama ini BRI selalu menjalankan strategi *business process* secara optimal dan efisien. Keduanya terbukti berhasil

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



mendukung upaya BRI dalam menyalurkan kredit di segmen mikro, termasuk KUR," ungkapnya.

Di samping itu, BRI juga menerapkan digitalisasi untuk menyalurkan kredit sehingga lebih efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan BRI dalam menyalurkan KUR ini juga dibuktikan dengan realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun lalu. Tercatat sepanjang Januari 2021 hingga Desember 2021, BRI berhasil menyalurkan KUR mencapai Rp194,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. Penyaluran KUR BRI sepanjang 2021 tersebut juga tercatat naik 40,7% *year-on-year* (yoy) dibandingkan dengan penyaluran KUR BRI di tahun 2020 sebesar Rp138,5 triliun.

Fokus BRI terus diarahkan pada segmen mikro sebagai *core* utama pertumbuhan pinjaman KUR. Dengan menyalurkan kredit ke sektor produktif, BRI mampu menjaga momentum dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk tahun ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menetapkan kuota penyaluran KUR 2022 yang meningkat menjadi sebesar Rp373,17 triliun. Dari jumlah tersebut, BRI mendapatkan alokasi sebesar Rp260 triliun atau mencapai 70% dari total KUR yang dialokasikan. BRI sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar di Indonesia optimistis dapat mencapai target KUR 2022 hingga akhir tahun.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Reformasi Lahan untuk Kesejahteraan

Lahan bagi petani bukan hanya sekadar aset semata tetapi juga bermakna sosial budaya, ekonomi, politik dan bahkan kepercayaan. Lahan merupakan barang produksi yang tidak dapat diperbanyak dan tidak dapat dipindahkan.

Oleh karena itu, lahan dalam usaha tani mempunyai nilai terbesar. Bahkan menurut Breman (1985) lahan menciptakan keamanan dan stabilitas bagi petani. Ironisnya, mayoritas petani di Indonesia merupakan petani gurem atau petani berlahan sempit (di bawah 0,5 hektare). Proporsi petani gurem dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada 2003, proporsinya sebesar 51%. Pada 2018 naik menjadi 58% dari total rumah tangga petani (BPS, 2019).

Menurunnya penguasaan lahan oleh petani berdampak kepada penurunan pendapatan petani. Kemunduran kesejahteraan petani dapat tecermin dari penurunan rata-rata nilai tukar petani (NTP). Pada 2000 rata-rata NTP mencapai 123,40 sementara pada 2019 mencapai 102,99.



ELIZA MARDIAN
Peneliti CORE Indonesia

Lahan sempit, meski sudah diintensifikasi, tetap saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga diperlukan pendapatan dari sumber lainnya. Selain permasalahan sempitnya lahan, petani di Indonesia pun dihadapkan dengan rasio gini kepemilikan lahan yang terus mengalami peningkatan.

Pada 2003 rasio gini lahan sebesar 0,56 sedangkan pada 2018 rasio gininya mencapai 0,70 (Bachriadi, 2021). Tinggi rendahnya nafkah dan tingkat kesejahteraan petani banyak ditentukan dari struktur agrarian, susunan

atau distribusi kepemilikan, dan garapan atas lahan.

Salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketimpangan lahan adalah melalui perbaikan struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan. Upaya memperbaiki struktur kepemilikan lahan tersebut dilakukan melalui reforma agraria.

Kebijakan pendistribusian lahan muncul berulang dalam arena kebijakan pertanahan nasional. Pada awal kemerdekaan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) menjadi tonggak kebijakan agraria. Agenda reforma agraria kembali menjadi agenda nasional pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Agenda reforma agraria diterjemahkan dalam berbagai program seperti legalisasi aset dan redistribusi lahan. Legalisasi aset dilaksanakan melalui kegiatan sertifikasi lahan transmigrasi dan sertifikasi umum. Di sisi lain, redistribusi lahan dilaksanakan melalui pendistribusian lahan eks hak guna usaha (HGU) serta pelepasan kawasan hutan. Jika kita renungkan, manifestasi agen-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

da reforma agraria tersebut belum dapat mengatasi persoalan utama, yakni ketimpangan lahan.

Rasio gini kepemilikan lahan akan tetap tinggi selama lahan masih terkonsentrasi di beberapa pihak dan belum ada upaya nyata untuk memperbaiki hal tersebut. Reforma agraria akan efektif meningkatkan kesejahteraan petani jika pemerintah menyediakan lahan sesuai kebutuhan minimal untuk penghidupan.

Selain itu perlu adanya jaminan harga, pasar, kredit, hukum, akses sarana produksi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan pelatihan (Wiradi, 2009).

Berkaca pada pendistribusian lahan di Desa Sukawargi Garut, lahan eks HGU PT Hardjasari seluas sekitar 107 hektare yang dibagikan kepada 408 kepala keluarga, pembagiannya tidak merata. Ada masyarakat yang menerima 3 hektare dan bahkan ada yang menerima 0,16 hektare. Agenda pemberdayaan setelah pemberian lahan pun belum sepenuhnya dilakukan, sehingga belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan (Adiprana dkk, 2021).

Pada intinya, untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak mesti hanya dengan reforma agraria. Kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan perbaikan sistem insentif. Sektor pertanian harus menjanjikan keuntungan.

Saat pendapatan dari produksi melampaui biaya konsumsi, petani akan melakukan investasi di sektor pertanian untuk meningkatkan atau memperoleh sumber daya penunjang produksi dan meningkatkan kemampuannya (Swift, 1989). Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun sentra distribusi yang didukung dengan sistem informasi. Dalam hal ini adalah Pusat Distribusi Komoditas Terpadu (PDKT).

PDKT di setiap desa menghimpun informasi pasar, harga, lahan, tenaga kerja, bantuan serta pelatihan. PDKT setiap desa dapat bertukar informasi dan diakses oleh kementerian/lembaga terkait untuk menetapkan kebijakan.

Dengan adanya PDKT, pemasaran dan distribusi menjadi lebih terencana dan terukur, fluktuasi harga terkendali dan juga dapat mengurangi ketidakpastian dalam sewa dan lahan menganggur. Para pemilik lahan melakukan kontrak kerja sama untuk menyewakan lahannya dalam jangka waktu tertentu.

PDKT pun dapat menghimpun informasi tenaga kerja yang tersedia di desa serta menyediakan informasi bantuan, pelatihan dan pengembangan keahlian petani.

Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, karena ketika petani sejahtera, tidak ada keraguan lagi bagi mereka dalam melanjutkan ekspansi usaha taninya.

2

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Visa Pertanian Australia dan Regenerasi Petani Indonesia



MUKHAMAD NAJIB

Atase Pendidikan RI Canberra dan Dosen Institut Pertanian Bogor

Pada pengujung 2021, Pemerintah Federal Australia memperkenalkan visa pertanian untuk pekerja dari negara Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini untuk membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pengolahan daging yang dialami Australia. Kurangnya pekerja di sektor pertanian sebenarnya sudah dialami Australia jauh sebelum pandemi Covid-19. Namun, penutupan perbatasan Australia karena pandemi telah mempercepat defisit tenaga kerja pertanian sekitar 30.000 orang.

Selama ini kita mengenal Australia sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang pertanian. Pertanian di Australia

merupakan sektor yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebesar 55% lahan di Australia digunakan untuk pertanian, di mana sekitar 70% hasil pertanian, perikanan, dan hutan diekspor ke berbagai negara (ABARES, 2020). Pertanian dinilai mampu menyejahterakan petani Australia dengan penghasilan rata-rata pada 2020-2021 diperkirakan mencapai AUD184,000 (setara sekitar Rp1,84 M) per petani per tahun (ABARES 2021).

Namun, luasnya lahan pertanian di Australia tidak sebanding dengan jumlah petani yang sangat sedikit. Ditambah lagi, petani Australia juga mengalami penuaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Biro Statistik Australia, rata-rata petani Australia berada di usia 52 tahun dengan jumlah petani berusia di bawah 30 tahun tidak mencapai 10%. Hal ini mendorong Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan "impor" pekerja tani untuk menyelamatkan sektor pertaniannya.

Regenerasi Petani

Saat ini Indonesia mengalami masalah dalam regenerasi petani. Data dari survei tenaga kerja nasional pada 2019 menunjukkan bahwa hanya 23% dari 14,2 juta orang berusia 15-24 tahun yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah

pekerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun. Dalam kurun waktu 2015-2019 jumlah pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 33% menjadi 29%.

Rendahnya minat kaum muda terhadap dunia pertanian selama ini karena pertanian di Indonesia dianggap kurang menarik. Kaum muda memersepsi pertanian identik dengan risiko tinggi, pendapatan rendah, dan hanya cocok untuk mereka dengan latar belakang pendidikan terbatas. Profesi petani tidaklah dianggap sebagai profesi yang membanggakan kaum muda. Inilah yang menyebabkan regenerasi petani serasa berhenti di Bumi Pertiwi.

Sementara di Australia, dunia pertanian terbukti modern dan mampu menyejahterakan. Lebih dari itu, petani di Australia juga merupakan profesi penting yang dihargai. Gambaran pertanian Australia yang modern, maju, dan dihargai berpotensi menjadi daya tarik kaum muda Indonesia terhadap pertanian. Hal ini sesuai dengan teori Maslow yang menempatkan penghargaan (*self-esteem*) sebagai salah satu kebutuhan tertinggi yang dapat mendorong seseorang untuk bergerak.

Dalam konteks ini, tawaran visa pertanian dari Pemerintah Australia bagi kaum muda Indonesia dapat menjadi peluang segar bagi regenerasi petani Indonesia. Kaum muda Indonesia,

dengan tendensi mengejar kesejahteraan, kemajuan, dan penghargaan, dapat mengisi kekurangan tenaga kerja pertanian di Australia. Tentu bukan semata-mata untuk bekerja, tapi untuk belajar, mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman yang kelak bisa digunakan dalam mengembangkan pertanian Indonesia. Dengan begitu, visa pertanian yang ditawarkan Australia ini diharapkan dapat menjadi pintu bagi regenerasi petani Indonesia.

Manfaatkan Peluang



KORAN SINDO/WAWAN BASTIAN

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Peluang yang ada harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan dunia pertanian yang lebih luas. Momentum pandemi yang belum sepenuhnya selesai, di mana lapangan kerja belum sepenuhnya terbuka kembali di Indonesia, dapat menjadi penggerak untuk mendorong kaum muda Indonesia memanfaatkan visa pertanian ini.

Paling tidak ada tiga hal yang dapat dimanfaatkan dari visa pertanian Australia. *Pertama*, meningkatkan minat kaum muda Indonesia untuk bertani. Visa pertanian membuka peluang untuk menciptakan gambaran yang berbeda tentang dunia pertanian dari yang selama ada di benak kaum muda Indonesia. Dengan pergi ke Australia dan melihat modernitas yang terjadi di dunia pertanian Australia, kaum muda Indonesia diharapkan lebih termotivasi dengan dunia pertanian.

Kedua, meningkatkan kompetensi dan pengalaman Australia merupakan salah satu negara maju yang mengembangkan pertaniannya dengan teknologi dan inovasi di mana hal ini terbukti melahirkan produktivitas yang tinggi. Visa pertanian dapat dimanfaatkan sebagai pintu bagai kaum muda tani Indonesia untuk belajar dan

memperoleh pengalaman baru dalam mengelola pertanian modern berbasis teknologi dan inovasi. Terjadinya akuisisi pengetahuan, teknologi, dan pengalaman oleh petani muda Indonesia pada akhirnya berpotensi mendorong kemajuan pertanian Indonesia di masa depan.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan pekerja tani di Australia sangatlah menjanjikan dari sisi kesejahteraan. Karena itu, visa pertanian ini juga dapat dimanfaatkan oleh petani muda Indonesia sebagai jalan menuju kesejahteraan. Akumulasi kesejahteraan yang diperoleh nanti dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber investasi untuk mengembangkan bisnis pertanian di Indonesia.

Merdeka Belajar

Saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi mahasiswa salah satunya untuk belajar dan magang di luar negeri. Akan sangat baik bila mahasiswa pertanian Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan Merdeka Belajar ini untuk belajar pertanian secara langsung bersama petani Australia. Dalam hal ini visa pertanian merupakan peluang untuk melakukan praktik lapangan atau magang internasional di sektor pertanian Australia se-

bagai implementasi Merdeka Belajar. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan pertanian Indonesia yang modern, produktif, dan menyejahterakan.

Memberi kesempatan kepada anak muda Indonesia untuk terpapar pada dunia pertanian di Australia akan memberikan daya tarik dan motivasi tersendiri karena dapat mengubah persepsi mereka mengenai dunia pertanian. Karena itu, sangat baik jika kelak Indonesia bisa mengirimkan mahasiswa dan kader-kader petani muda belajar ke Australia dengan memanfaatkan visa pertanian yang ditawarkan. Mereka bekerja di sektor pertanian, memperoleh imbalan kesejahteraan, dan pada saat yang sama mereka juga bisa belajar bagaimana bisnis pertanian berbasis teknologi dan inovasi dijalankan di Australia.

Banyaknya jumlah petani muda yang bisa memanfaatkan visa pertanian Australia dapat berdampak positif bagi masa depan sektor pertanian di Indonesia secara luas. Dalam perspektif pembangunan pertanian jangka menengah dan panjang, visa pertanian dapat dijadikan sebagai instrumen penyegar dalam proses regenerasi petani Indonesia. Alumni pemegang visa pertanian dengan ilmu dan pengalamannya kelak akan memberikan warna baru bagi dunia pertanian Indonesia. 

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Agama dan Boros Pangan

Food loss and waste (FLW) atau susut dan limbah pangan menjadi persoalan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebab, kerugian yang ditimbulkan tidak saja pada aspek pangan itu sendiri, tetapi juga memengaruhi ekonomi dan lingkungan.

Hasil kajian Bappenas 2021 menunjukkan, dalam kurun 10 tahun (2009-2019) Indonesia menghasilkan FLW mencapai 115-184 kg per kapita per tahun. Ini dapat memberi makan 61-125 juta orang atau sekitar 29-47 persen populasi Indonesia. Sedangkan estimasi kerugian dari timbunan FLW diperkirakan Rp 213 triliun-Rp 551 triliun per tahun atau setara 4-5 persen PDB Indonesia.

Belum lagi dampak lingkungan yang dihasilkan dari timbunan sampah pangan yang diperkirakan 1.702,9 Mt CO₂ ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara 7,29 persen emisi gas rumah kaca Indonesia yang memengaruhi pemanasan global.

Menurut FAO, FLW merupakan penurunan kuantitas dan kualitas yang mencakup lima tahap rantai pasok, yaitu produksi, pascapanen dan penyimpanan, pemrosesan dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, serta konsumsi. ^{4.5}

Food loss terjadi di tiga tahap pertama rantai pasok, sedangkan food waste terjadi pada dua tahap terakhir, yaitu distribusi dan pemasaran serta konsumsi.

Dari sisi tahapan rantai pasok, timbunan terbesar terjadi pada tahap konsumsi. Artinya, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi pangan masih cenderung boros dan tidak memperhitungkan aspek efisiensi pangan yang dikonsumsi.

Ini dapat disebabkan masyarakat kurang

mendapat edukasi mengenai penyimpanan pangan yang baik, untuk meminimalisasi potensi pangan yang rusak sebelum dikonsumsi.

Di sekitar kita, mudah ditemukan perilaku konsumtif yang memicu pemborosan, termasuk dalam hal pangan. Perilaku konsumsi seperti menyisakan makanan di piring atau memesan banyak makanan, padahal porsi makan sedikit dianggap sesuatu yang wajar.

The Intelligence Economic Unit menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar kedua penghasil sampah pangan di dunia. Peringkat pertama diduduki Arab Saudi. Ini cukup ironis, mengingat dua negara tersebut penduduknya mayoritas Muslim.

Dalam Islam, perilaku boros (termasuk boros pangan) digolongkan ke dalam perbuatan tercela (mubazir).

Mereka yang melakukan perbuatan tersebut dikategorikan saudara setan (QS Al-Isra 27). Ini seolah-olah mengonfirmasi hasil survei 10 tahun lalu.

Survei oleh profesor dari George Washington University berjudul *How Islamic are Islamic Countries* yang menunjukkan, negara-negara Islam justru jauh dari ajaran Islam dibandingkan negara non-Muslim yang perilakunya lebih Islami.

Survei itu mengukur lima aspek, yaitu hubungan seseorang dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik serta kehidupan sosial, sistem perundang-undangan dan pemerintahan, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional dan masyarakat non-Muslim.

Ini menunjukkan gap antara agama sebagai pengetahuan dan perilaku sehari-hari. Padahal, kata mubazir sudah sangat familier di tengah masyarakat. Penulis yakin, semua agama mengajarkan kebijaksanaan dalam pemanfaatan pangan untuk kehidupan.

Seperti dalam ajaran Kristen, Yesus



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

mengingatkan tidak membuang-buang sisa makanan seandainya (Yohanes 6:11). Dalam Hindu terdapat pesan dalam *Taittiriya Upanisad*, Bharguvali, Anuvak 1: Jangan pernah menunjukkan rasa tidak hormat kepada makanan.

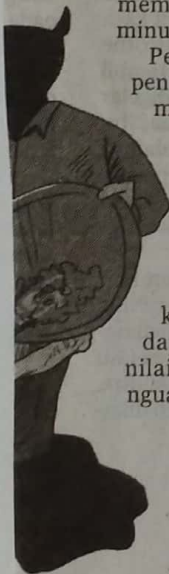
Makanan adalah sumpah suci agama. Konsep *mindful eating*, yang diadopsi dari ajaran Buddha Mahayana mengajarkan agar manusia menghargai setiap proses dalam mengonsumsi pangan, dengan memperhatikan makanan dan minuman yang masuk tubuh.

Pendekatan agama menjadi penting sebagai salah satu upaya menekan pemborosan pangan yang terjadi di masyarakat.

Jika selama ini kampanye boros pangan sering kali menekankan pada kerugian ekonomi dan dampak lingkungan, ke depan kampanye dan edukasi terkait boros pangan, juga dapat mengakomodasi nilai-nilai dalam agama untuk menguatkan narasi.

Penanaman kesadaran sejak dini terhadap generasi muda menjadi pilihan yang rasional. Muatan-muatan lokal dalam pengajaran, penyuluhan, dan edukasi harus digencarkan di sekolah-sekolah dengan kemasan yang menarik dan kekinian.

Dengan begitu, kita berharap, adanya perubahan perilaku yang didasarkan pada kesadaran yang kuat sebagai umat beragama, warga negara, dan warga bumi. ■



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



"Seluruh jajaran, seluruh masyarakat tani yang ada, seluruh kelompok tani yang ada menyampaikan terima kasih kepada *Media Indonesia* yang sudah 52 tahun mengawal bangsa ini, mengawal pertanian dengan berbagai informasi. Selamat ulang tahun ke-52 *Media Indonesia*. Ridho Allah bersama kita. Sekian Ass Wrb." M-9

Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian

ANTARA